BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 53 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 150, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004, tentang Transparansi dan Partisifasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007, tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 19);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (lembaran Daerah Kabupaten Bandung TAhun 2007 Nomor 20 tahun 2007) sebagaimana telah beberapa kali *diubah terakhir dengan* Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 23);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 25);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 22);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2009, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008, tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 25);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 11);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2011, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 11);

22. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 24);

23. Peraturan Bupati Bandung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 4);

24. Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 28 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 28);

25. Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 30 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 30);

26. Peraturan Bupati Bandung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 7);

27. Peraturan Bupati Bandung Nomor 53 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Badan Penanggulan Bencana Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 53);

28. Peraturan Bupati Bandung Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tugas Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 29).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Kabupaten adalah Kabupaten Bandung.

5. Bupati adalah Bupati Bandung.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung selaku pelaksana urusan pemerintahan di Wilayah Kabupaten Bandung.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung selanjutnya disebut SKPD kabupaten adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan lembaga lain di wilayah Kabupaten Bandung.

8. Sekretariat Daerah selanjutnya disebut Setda adalah Unsur Staf Pemerintah Daerah.

9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.

10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan terhadap DPRD.

11. Dinas Daerah adalah Unsur Pelaksana Otonomi Daerah.

12. Lembaga Teknis Daerah adalah Unsur Pendukung tugas Kepala Daerah.

13. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.

14. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.

15. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD adalah pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.

16. *Unit Pelaksana Teknis* selanjutnya disebut *UPT* adalah pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.

17. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

18. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

19. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

20. Pemantauan kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan infomasi: (1) hasil pengukuran kinerja, dan (2) identifikasi, analisis serta antisipasi masalah yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

21. Instansi Pemerintah adalah sebutan kolektif dari unit organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meliputi Kementerian Koordinator/Kementerian Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, Pemerintah Kabupaten, serta lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

22. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.

23. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

24. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan atau APBD.

25. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.

26. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan.

27. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.

28. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan.

29. lndikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

30. Unit kerja adalah unit organisasi di lingkungan satuan kerja perangkat daerah yang memiliki dan mengelola sendiri sumber daya berupa sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana yang ada di lingkungannya.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan penetapan IKU di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung adalah:

a. untuk memperoleh inforrnasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;

b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB III

PEMILIHAN, PENETAPAN, DAN PENGEMBANGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 3

Pemilihan dan penetapan IKU harus mempertimbangkan beberapa hal berikut ini yaitu:

a. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, kebijakan umum dan atau dokumen strategis lainnya yang relevan;

b. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta peran lainnya;

c. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;

d. Kebutuhan data statistik pemerintah;

e. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan

Pasal 4

(1) Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung harus selaras antar tingkatan unit organisasi.

(2) Indikator Kinerja Utama pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator keluaran (output) dan hasil (outcome) dengan tatanan sebagai berikut :

a. Indikator Kinerja Utama Tingkat Kabupaten sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi;

b. Indikator Kinerja Utama Tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi.

Pasal 5

(1) Bagi SKPD yang membidangi urusan Wajib, agar mencantumkan Indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal sebagai IKU SKPD.

(2) Dalam memilih dan menetapkan IKU, setiap SKPD dapat mengidentifikasi daftar pedoman IKU sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini atau mengidentifikasi indikator lainnya sesuai dengan Rencana Strategis SKPD.

(3) Daftar IKU yang telah disusun oleh setiap SKPD disampaikan kepada Bupati melalui sekretaris Daerah dengan format sebagaimana tecantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Daftar IKU yang disusun oleh SKPD merupakan bahan bagi penyusunan IKU tingkat Pemerintah Kabupaten setelah disesuaikan dengan RPJMD.

Pasal 6

Pemilihan dan penetapan IKU di lingkungan instansi pemerintah melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Pasal 7

Pemilihan dan penetapan IKU harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu:

a. spesifik;

b. dapat dicapai;

c. relevan;

d. menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur;

e. dapat dikuantifikasi dan diukur.

Pasal 8

Bupati menetapkan IKU Kabupaten Bandung yang berasal dari gabungan IKU SKPD dengan berpedoman kepada rencana strategis Kabupaten Bandung.

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan review secara berkala terhadap penerapan IKU di setiap tingkatan untuk menyesuaikan dengan perubahan program dan kegiatan seiring dengan perubahan arah kebijakan pembangunan yang berkembang di tingkat Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

(2) Review penerapan IKU dimaksudkan agar setiap program dan kegiatan tetap memiliki indicator kinerja yang valid.

(3) Review penerapan IKU dikoordinasikan oleh Inspektorat selaku instansi Pengawas internal pemerintah daerah.

Pasal 10

(1) Pengembangan dan penetapan IKU wajib menggunakan prinsip-prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan, dan transparansi guna *menghasilkan informasi kinerja yang handal.*

(2) Dalam hal IKU ini menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan, pimpinan unit organisasi melaporkan kepada unit organisasi di atasnya agar ditentukan pengembangannya lebih lanjut untuk perbaikan.

(3) Pengaturan lebih lanjut rnengenai pengembangan dan penetapan IKU di lingkungan instansi pemerintah ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah yang bersangkutan dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

BAB IV

PENGGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 11

lKU digunakan instansi pemerintah untuk :

a. perencanaan jangka menengah;
b. perencanaan tahunan;
c. penyusunan dokumen penetapan kinerja;
d. pelaporan akuntabilitas kinerja;
e. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Pasal 12

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada setiap tingkatan organisasi harus dinyatakan dengan IKU.

Pasal 13

(1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan rnemperhatikan capaian IKU untuk melengkapi *informasi yang dihasilkan dalam pengukuran* kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

(2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

BAB V

PEMBINAAN DAN KOORDINASI

Pasal 14

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan:

a. pembinaan dalam pengembangan dan penetapan IKU di lingkungan masing-masing;

b. koordinasi untuk pengintegrasian sistem pengukuran kinerja dengan sistem administrasi pemerintahan yang lainnya baik perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban.

Pasal 15

Hal-hal yang belum dicantumkan dalam Peraturan Bupati ini, selanjutnya akan diatur dalam Peraturan tersendiri.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal **21 November 2012**

BUPATI BANDUNG,

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal **21 November 2012**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

SOPIAN NATAPRAWIRA
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19581229 198603 1 01.

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012 NOMOR **47**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 53 TAHUN 2012
TANGGAL : 21 November 2012
TENTANG : PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

FORMAT INDIKATOR KINERJA UTAMA

KABUPATEN :
SKPD/UNIT KERJA :
URUSAN :
TUGAS DAN FUNGSI :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penanggung jawab	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6

KEPALA SKPD

.....
Pangkat
NIP.

Keterangan :

1. Kolom 2 diisi dengan sasaran Organisasi sesuai dengan dokumen sasaran strategis.
2. Kolom 3 diisi dengan Indikator Kinerja Utama dari organisasi sesuai dengan Renstra berdasarkan penetapan IKU.
3. Kolom 4 diisi dengan SKPD/Unit Kerja Penanggung jawab pelaksanaan kegiatan.
4. Kolom 5 diisi dengann Sumber data yang diambil untuk bahan perhitungan target IKU.
5. Kolom 6 diisi dengan Penjelasan Formula perhitungan penentuan pencapaian IKU.

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 53 TAHUN 2012
TANGGAL : 21 November 2012
TENTANG : PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

NO	INDIKATOR KINERJA	REFF
1	2	3
1	**PENDIDIKAN**	
	KUALITAS PENDIDIKAN:	
	Indeks Pembangunan Manusia	
	Angka melek huruf:	
	Angka melek huruf seluruh penduduk	Diknas
	Angka melek huruf pada usia dewasa	PP 6/2008 /Diknas
	Angka melek huruf pada usia 15-24 tahun	MDG
	Nilai NEM rata-rata:	
	Nilai NEM rata-rata SD	
	Nilai NEM rata-rata SLTP	
	Nilai NEM rata-rata SLTA	
	Angka pendidikan yang ditamatkan/ Angka Lulusan (AL)	PP 6/2008 /Diknas
	Angka Mengulang Sekolah (AU)	Diknas
	Angka Putus Sekolah (APS)	Diknas
	Angka Melanjutkan (AM)	Diknas
	Angka rata-rata lama sekolah	
	Angka rata-rata lama sekolah pada pendidikan dasar	PP 6/2008
	Angka rata-rata lama sekolah pada pendidikan menengah	PP 6/2008
	KUANTITAS PENDIDIKAN:	
	Angka partisipasi murni (APM)	
	Angka partisipasi murni pada pendidikan dasar	PP 6/2008 /Diknas
	Angka partisipasi murni pada pendidikan menengah	PP 6/2008 /Diknas
	Angka partisipasi kasar (APK)	
	Angka partisipasi kasar pada pendidikan dasar	PP 6/2008 /Diknas
	Angka partisipasi kasar pada pendidikan menengah	PP 6/2008 /Diknas
	Angka partisipasi Murni Usia Sekolah (APMUS)	Diknas
	KUANTITAS SEKOLAH DAN RUANG KELAS:	PP 6/2008
	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	
	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pada pendidikan	PP 6/2008
	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pada pendidikan	PP 6/2008
	Rasio siswa per kelas (R-S/K)	Diknas
	Rasio siswa per sekolah (R-S/Sek)	Diknas
	KUALITAS SEKOLAH DAN RUANG KELAS:	
	% Fasilitas terhadap jumlah sekolah (% FS)	Diknas
	Kondisi Ruang kelas	
	% Ruang kelas kondisi baik	Diknas
	% Ruang kelas kondisi rusak	Diknas
	KUANTITAS GURU:	
	Rasio siswa per guru (R-S/G)	Diknas
	Rasio guru terhadap murid pada pendidikan dasar	PP 6/2008
	Rasio guru terhadap murid pada pendidikan menengah	PP 6/2008
	Rasio guru per sekolah (R-G/Sek)	Diknas
	Rasio guru/murid per kelas rata-rata pada pendidikan dasar	PP 6/2008
	Rasio guru/murid per kelas rata-rata pada pendidikan menengah	PP 6/2008
	KUALITAS GURU:	
	% Kepala Sekolah dan Guru menurut Ijazah Tertinggi (%GI)	Diknas
	% Kelayakan Mengajar Kepala Sekolah dan Guru (%GL)	Diknas
	KUALITAS PELAYANAN:	
	Tingkat Pelayanan Sekolah (TPS)	
	Tingkat Pelayanan Sekolah (TPS) SD	Diknas
	Tingkat Pelayanan Sekolah (TPS) SLTP	Diknas
	Tingkat Pelayanan Sekolah (TPS) SLTA	Diknas

NO	INDIKATOR KINERJA	REFF
1	2	3
2	**KESEHATAN**	
	KUALITAS KESEHATAN:	
	Angka usia harapan hidup	PP 6/2008
	Angka harapan hidup pada saat lahir	
	Angka harapan hidup pada saat usia 65 tahun	
	Angka Prevalensi Penyakit:	
	Angka Prevalensi Penyakit Malaria	MDG/ Depkes
	Angka Prevalensi Penyakit TBC	MDG
	Angka Prevalensi Penyakit DBD	Depkes
	Angka Prevalensi Penyakit HIV	Depkes
	Angka Acute Flaccid Paralysis(AFP)	Depkes
	Angka Kematian:	
	Angka Kematian Kasar (per 1,000 penduduk)	
	Angka Kematian karena Penyakit Malaria	MDG
	Angka Kematian karena Penyakit TBC	MDG
	Angka Kematian karena Penyakit DBD	
	Angka Kematian karena Penyakit HIV	
	Angka Kesembuhan:	
	Angka Kesembuhan Penderita TB paru BTA	Depkes
	Persentase Kecamatan Bebas Rawan Gizi	Depkes
	Persentase populasi yang mengkonsumsi di bawah batas minimal	MDG
	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat.	Depkes
	Persentase Desa yang mencapai "Universal Child Immunization" (UCI)	Depkes
	Persentase Rumah Sehat	Depkes
	Persentase Tempat-tempat umum sehat	Depkes
	KUALITAS KESEHATAN BAYI/IBU MELAHIRKAN:	
	Angka Kelahiran Kasar (per 1,000 penduduk)	
	Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	MDG/ Depkes/ PP
	Angka kematian balita	MDG/ Depkes
	Angka kematian ibu melahirkan per 100.00 kelahiran hidup	MDG/ Depkes
	Persentase balita gizi buruk	PP 6/2008 / Depkes
	Angka prevalensi anak-anak di bawah berat badan normal	MDG
	Persentase Bayi yang mendapat ASI Eksklusif	Depkes
	KUALITAS PELAYANAN:	
	Proporsi kelahiran yang ditangani oleh tenaga terlatih	MDG/ Depkes
	Persentase Ibu hamil yang mendapat tablet Fe	Depkes
	Persentase penduduk yang memanfaatkan Rumah Sakit	Depkes
	Persentase penduduk yang memanfaatkan Puskesmas	Depkes
	Persentase desa terkena Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani < 24 jam	Depkes
	Persentase Murid Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah yang mendapat pemeriksaan mulut dan gigi	Depkes
	Persentase pekerja yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Kerja	Depkes
	Persentase Keluarga miskin yang mendapat Pelayanan Kesehatan	Depkes
	Persentase Penduduk yang menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan	Depkes
	Persentase masyarakat yang merasa puas dengan pelayanan kesehatan	
	Jumlah komplain masyarakat tentang pengelolaan kesehatan	
	KUANTITAS/KUALITAS TENAGA MEDIS:	
	Rasio dokter per satuan penduduk	PP 6/2008 / Depkes
	Rasio Dokter Spesialis per-100.000 penduduk	Depkes
	Rasio Dokter keluarga per 1000 keluarga	Depkes
	Rasio Dokter gigi per-100.000 penduduk	Depkes
	Rasio Apoteker per 100.000 penduduk	Depkes
	Rasio Bidan per 100.000 penduduk	Depkes
	Rasio Perawat per-100.000 penduduk	Depkes
	Rasio Ahli gizi per-100.000 penduduk	Depkes
	Rasio Ahli sanitasi per-100.000 penduduk	Depkes
	Rasio Ahli kesehatan masyarakat per 100.000 penduduk	Depkes
	KUANTITAS SARANA/PRASARANA:	
	Rasio posyandu per satuan balita	PP 6/2008
	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk.	PP 6/2008
	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	PP 6/2008
	Persentase obat generik berlogo dalam persediaan obat.	Depkes

NO	INDIKATOR KINERJA	REFF
1	2	3
	KUALITAS SARANA:	
	Persentase Rumah sakit yang menyelenggarakan 4 pelayanan kesehatan spesialis dasar	Depkes
	Persentase Posyandu Purnama dan mandiri	Depkes
	Persentase Sarana Kesehatan dengan kemampuan laboratorium kesehatan	Depkes
3	**KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**	
	KUALITAS KEPENDUDUKAN:	
	Proporsi penduduk	Dep
	Angka laju pertumbuhan penduduk	Dep
	Angka kepadatan penduduk	Dep
	Rasio penduduk yang bekerja	
	KUALITAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN:	
	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	PP 6/2008
	Persentase penduduk yang memiliki lebih dari satu KTP	
	Rasio bayi berakte kelahiran	PP 6/2008
	Rasio pasangan berakte nikah	PP 6/2008
	Persentase desa yang telah terhubung dengan jaringan sistem informasi administrasi kependudukan	
	Persentase kecamatan yang mempunyai data tentang kependudukan di wilayahnya	
	KUALITAS PELAYANAN:	
	Persentase permohonan pembuatan dokumen akte kelahiran yang dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan	
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan administrasi	
4	**KETENAGAKERJAAN**	
	KUANTITAS KETENAGAKERJAAN:	
	Angka pengangguran	Dep
	Angka pengangguran pada penduduk usia 15-24 tahun	MDG
	Rasio penduduk yang bekerja	PP 6/2008 /Dep
	Persentase penduduk yang bekerja terhadap total penduduk	Dep
	Persentase angkatan kerja terhadap jumlah penduduk	Dep
	Laju pertumbuhan angkatan kerja	Dep
	Persentase penduduk usia produktif terhadap total penduduk	Dep
	Laju pertumbuhan penduduk usia produktif	Dep
	Angka partisipasi angkatan kerja	PP 6/2008 /Dep
	Prospek kesempatan kerja	Dep
	Pertumbuhan penyerapan tenaga kerja	Dep
	Angka ketergantungan	Dep
	Jumlah permintaan tenaga kerja	
	Rasio jumlah tenaga kerja tersedia terhadap jumlah lowongan kerja	
	KUALITAS KETENAGAKERJAAN:	
	Rasio lulusan S1/S2/S3	PP 6/2008
	Rasio tenaga kerja terampil dibandingkan dengan tenaga kerja tidak terampil	
	Rasio tenaga kerja terdidik dibandingkan dengan tenaga kerja tidak terdidik	
	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	PP 6/2008
	Persentase kejadian unjuk rasa yang berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan	
5	***KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA***	
	KUALITAS KELUARGA:	
	Persentase keluarga dengan jumlah anak kurang dari tiga	
	Persentase pasangan usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi	
	Persentase partisipasi pria usia subur dalam menggunakan alat kontrasepsi	
	Persentase bayi yang mendapat ASI ekslusif	
	Persentase keluarga pra sejahtera dibandingkan jumlah total keluarga	
	Jumlah akseptor KB	

NO	INDIKATOR KINERJA	REFF
1	2	3
6	**PEMUDA DAN OLAH RAGA**	
	KUANTITAS KEPEMUDAAN:	
	Jumlah organisasi pemuda	PP 6/2008
	Jumlah kegiatan kepemudaan	PP 6/2008
	KUALITAS KEPEMUDAAN:	
	Jumlah tokoh lokal dan nasional dari Bandung yang berusia dibawah 45 tahun	
	KUALITAS KEBIJAKAN OLAHRAGA:	
	Jumlah kebijakan nasional bidang olah raga yang telah ditindaklanjuti	
	KUANTITAS KEOLAHRAGAAN:	
	Jumlah kegiatan olahraga	PP 6/2008
	Persentase penduduk yang menjadi anggota klub olahraga	
	Persentase cabang olahraga yang menjalankan kompetisi secara teratur	
	Jumlah kegiatan olah raga masal dalam satu bulan	
	Persentase masyarakat yang aktif melaksanakan minimal satu cabang olahraga minimal 1 kali seminggu	
	KUALITAS KEOLAHRAGAAN:	
	Persentase nomor cabang olahraga yang meraih medali dalam kompetisi tingkat nasional	
	Persentase rekor nasional yang dikuasai oleh atlet daerah	
	Jumlah atlet daerah yang dikirim ke event olahraga di luar negeri	
	KUANTITAS KEOLAHRAGAAN:	
	Jumlah organisasi olahraga	PP 6/2008
	Jumlah klub olahraga	PP 6/2008
	Jumlah gedung olah raga	PP 6/2008
	Rasio fasilitas kolam renang per 1.000 populasi	
	Persentase kecamatan yang mempunyai sarana olahraga untuk umum	
	Jumlah gedung olah raga	PP 6/2008
7	**PEKERJAAN UMUM**	
	KUANTITAS PEKERJAAN UMUM:	
	Jumlah jembatan yang dibangun	
	Jumlah panjang jalan lingkungan pemukiman yang direhabilitasi	
	Jumlah pengadaan mesin dan alat pemeliharaan jalan	
	Jumlah panjang jalan yang ditingkatkan kelasnya	
	KUALITAS PEKERJAAN UMUM:	
	Jumlah kendaraan yang lewat per hari di jalan yang baru dibangun	
	Persentase kelurahan/desa yang telah memiliki jalan ekonomi	
	Jumlah arus barang hasil pertanian dari desa ke kota	
	Persentase kecamatan yang memiliki data tentang kondisi jalan di daerahnya	
	Persentase panjang jalan yang mampu menampung beban kendaraan diatas 5 ton	
	Rata-rata waktu tempuh kendaraan yang lewat jalan yang dibangun/direhabilitasi	
	Persentase kelurahan/desa yang dapat diakses melalui jalan yang dapat ditempuh oleh kendaraan umum	
8	**PERHUBUNGAN**	
	KUANTITAS PERHUBUNGAN:	
	Jumlah terminal bus antarkota yang dibangun	
	Jumlah pengadaan rambu-rambu lalu lintas	
	Jumlah saran pengujian kendaraan bermotor (PKB) yang diadakan	
	Persentase terminal bus kota yang dibangun dengan kualitas sesuai standar	
	KUALITAS PERHUBUNGAN:	
	Rata-rata panjang jalan per luas wilayah	
	Rata-rata panjang rel kereta api per luas wilayah	
	Jumlah kendaraan angkutan umum	
	Rata-rata jumlah orang yang menggunakan kendaraan angkutan umum per hari	
	Persentase kilometer rel kereta api yang dalam kondisi baik	

NO	INDIKATOR KINERJA	REFF
1	2	3
	Persentase kilometer jalan yang dalam kondisi baik	
	Persentase kendaraan umum yang berada dalam kondisi baik	
	Rata-rata kecelakaan lalu-lintas yang menyebabkan kematian atau luka parah per 100.000 penduduk per tahun	
9	**PERTANIAN**	
	KUALITAS PERTANIAN:	
	Luas lahan tanaman pangan	
	Produksi tanaman pangan	
	Laju Pertumbuhan produksi tanaman pangan	
	Produktivitas sektor pertanian	
	Persentase desa yang telah memenuhi swasembada pangan	PP 6/2008
	Persentase penduduk yang memiliki lahan	PP 6/2008
	Jumlah/jenis komoditi pertanian yang menjadi komoditas ekonomi	
	Penghasilan rata-rata petani	
	Rasio pemenuhan kebutuhan pangan	
	Jumlah/volume hasil pertanian tanaman pangan	
	Luas lahan pertanian tanaman pangan	
	PDRB dari sektor pertanian	
	Rata-rata pendapatan per kapita masyarakat petani	
	Jumlah nilai ekspor produksi pertanian dan peternakan	
	Jumlah produksi tanaman pangan (per jenis tanaman pangan)	
	Jumlah luas areal untuk lahan tanaman pangan (per jenis tanaman pangan)	
	Rata-rata produktivitas tanaman pangan per hektar (per jenis tanaman pangan)	
	Laju Pertumbuhan produksi tanaman pangan	
	Persentase kebutuhan ketahanan pangan yang dapat dipenuhi oleh produksi	
	Persentase desa yang telah memenuhi swasembada pangan	PP 6/2008
	Luas lahan rata-rata yang dimiliki petani	
	Jumlah peserta pelatihan bidang pertanian	
	Peningkatan rata-rata hasil pertanian peserta pelatihan	
	Persentase penduduk yang memiliki lahan	PP 6/2008
	Jumlah tempat pengolahan padi yang telah menggunakan teknologi	
	Jumlah peternakan ayam yang telah menggunakan teknologi	
	Rasio petani yang memiliki dan mengolah lahan sendiri lebih dari 1 Ha	
	Volume hasil panen tanaman hortikultura per Ha	
	Rasio lahan perikanan dan petambak ikan;	
	Volume hasil ikan per Ha	
	Rasio pemenuhan daging per kapita	
	Volume hasil daging per bulan	
	Pendapatan rata-rata per tahun peternak	
	Pendapatan rata-rata per tahun petani kebun	
	Tingkat produktivitas kebun	
	Jumlah/jenis hasil kebun sampingan	
10	**PEMUKIMAN DAN PERUMAHAN**	
	KUALITAS PEMUKIMAN DAN PERUMAHAN:	
	Rasio rumah layak huni	
	Persentase keluarga yang telah memiliki rumah sendiri	
	Persentase Rumah Tangga yang tinggal di rumah yang mempunyai akses air bersih	
	Persentase Rumah Tangga yang tinggal di rumah berlantai tanah	
	Persentase Kepala Keluarga yang belum memiliki rumah layak huni	
	Persentase Rumah Tangga yang tinggal di rumah tanpa akses terhadap sanitasi	
11	**KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**	
	KUALITAS KOPERASI	
	Persentase koperasi aktif	PP 6/2008
	Jumlah UKM non BPR/LKMUKM	PP 6/2008
	Jumlah BPR/LKM	PP 6/2008
	Persentase kredit kepada koperasi/UKM terhadap Total Kredit	

NO	INDIKATOR KINERJA	REFF
1	2	3
	KUALITAS KOPERASI	
	Jumlah koperasi yang aktif	
	Jumlah Usaha Kecil yang aktif	
	Jumlah Usaha Menengah yang aktif	
	Jumlah anggota koperasi yang aktif	
	Persentase Usaha Kecil dan Menengah yang tertampung di pusat usaha	
	Persentase koperasi yang telah mengalami peningkatan klasifikasi	
	Persentase koperasi yang dapat menjalankan usahanya secara mandiri	
	Jumlah nilai volume perdagangan Usaha Kecil dan Menengah antar daerah	
12	**PERDAGANGAN**	
	KUALITAS PERDAGANGAN	
	Jumlah perusahaan yang terdaftar yang bergerak di sektor usaha perdagangan	
	Jumlah aliran barang dan jasa dari daerah lain	
	Jumlah aliran barang dan jasa ke daerah lain	
	Jumlah nilai ekspor barang dan jasa	
	Jumlah PDRB dari sektor perdagangan	
13	***INDUSTRI***	
	KUALITAS INDUSTRI:	
	Persentase total omzet industri kecil dan menengah dibandingkan dengan total omzet keseluruhan industri	
	Rata-rata omzet industri kecil dan menengah	
	Jumlah industri manufaktur (nonmigas)	
	Jumlah perusahaan industri baru	
	Jumlah perusahaan yang terdaftar yang bergerak di sektor usaha perindustrian	
	Jumlah perjanjian kerjasama antar industri	
	Jumlah wirausaha perbengkelan kapal	
	Jumlah investasi baru di bidang usaha industri	
	Persentase produk industri daerah yang sudah mendapatkan sertifikat SNI	
	Jumlah nilai ekspor barang dan jasa	
	Jumlah penerimaan PAD dari perijinan sektor usaha IKM	
	Jumlah penerimaan PDRB dari sektor perindustrian	
	Jumlah industri di Bandung	
	Jumlah tenaga kerja yang terserap sektor industri di Bandung	
14	**ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**	
	KUANTITAS ESDM:	
	Jumlah laporan hasil penelitian dan pengembangan pemanfaatan Mineral	
	Jumlah peserta pelatihan Mineral yang lulus dengan nilai minimal "Baik"	
	KUALITAS ESDM:	
	Persentase eksplorasi energi dan sumber daya mineral yang menerapkan prinsip *good mining process*	
	Persentase produktivitas usaha sektor pertambangan	
	Jumlah kejadian kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh eksplorasi energi dan sumber daya mineral	
	Jumlah kejadian kecelakaan kerja di lokasi eksplorasi energi dan sumber daya mineral	
	Persentase eksplorasi energi dan sumber daya mineral yang dikonsumsi oleh daerah	
	PDRB dari sektor energi dan sumber daya mineral	
15	**LINGKUNGAN HIDUP**	
	KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP:	
	Persentase penanganan sampah	PP 6/2008
	Persentase penduduk berakses air minum	PP 6/2008
	Persentase luas permukiman yang tertata	PP 6/2008
	Pencemaran Udara	

NO	INDIKATOR KINERJA	REFF
1	2	3
	Tingkat kualitas udara	
	Pencemaran Air	
	Tingkat kualitas air	
	Pencemaran Limbah Padat/Sampah (B3)	
	Tingkat kebersihan limbah	
	Tingkat pembuangan limbah industri	
	Tingkat pembuangan limbah pertambangan	
	Persentase desa yang telah mempunyai tempat pembuangan sampah	
	Persentase perusahaan yang telah mempunyai sistem pengelolaan limbah	
	Persentase perusahaan yang berpotensi mengganggu lingkungan hidup yang telah memiliki setifikat AMDAL	
	Rata-rata produksi sampah yang tidak terangkut per hari	
	Jumlah kasus pelanggaran terhadap lingkungan hidup	
	Rata-rata tingkat emisi karbondioksida per kapita	
	Rata-rata tingkat pencemaran limbah pada air sungai	
	Jumlah kebijakan nasional yang telah ditindaklanjuti dalam bentuk PERDA maupun PERBUP	
	KEHUTANAN	
	KUALITAS KAWASAN HUTAN:	
	Kerusakan Hutan	
	Angka Hot Spot	
	Angka kebakaran hutan dan lahan	
	Rasio tebang pilih permudaan alam	
	PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	
	KUALITAS KESEJAHTERAAN SOSIAL:	
	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	PP 6/2008
	Pertumbuhan PDRB	PP 6/2008
	Laju inflasi provinsi	PP 6/2008
	PDRB per kapita	PP 6/2008
	Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia	PP 6/2008
	Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	PP 6/2008
	Rasio ketergantungan	PP 6/2008
	Angka kemiskinan	MDG
	Jumlah Penduduk Miskin	
	Persentase Penduduk Miskin	
	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	
	Fasilitas Telepon per Kapita	
	Persentase Pasangan usia subur yang menjadi Akseptor Keluarga Berencana	
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Dep
	Indeks Kemiskinan Manusia (IKM)	Dep
	Persentase lansia yang tinggal di rumah jompo dibandingkan dengan jumlah total lansia	
	Persentase anak-anak dan remaja yang tinggal di rumah penampungan sosial dibandingkan dengan jumlah total anak-anak dan remaja	
	Persentase mantan pengguna narkotika yang sudah tidak lagi mengkonsumsi narkotika	
	Persentase lansia yang tinggal di rumah jompo dibandingkan dengan jumlah total lansia yang bermasalah	
	Persentase anak-anak dan remaja yang tinggal di rumah penampungan sosial dibandingkan dengan jumlah total anak-anak dan remaja bermasalah	
	Persentase mantan penghuni penampungan sosial yang telah mampu hidup mandiri	
	Jumlah panti sosial yang dikelola swasta	
	Jumlah donatur yang tercatat dalam pengelolaan masalah sosial	
	Jumlah panti sosial swasta yang mendapat pembinaan pemerintah	
	Persentase mantan penghuni penampungan sosial yang telah mampu hidup mandiri	
	Jumlah kelurahan yang memiliki POSYANDU Balita	

INDIKATOR KINERJA	REFF
2	3
Jumlah kelurahan yang memiliki POSYANDU Lansia	
Jumlah PERDA dan PERBUP tentang penanganan kesejahteraan sosial	
Jumlah rencana penanganan korban banjir dan sosial yang disusun	
Jumlah pelatihan penanganan banjir	
PENINGKATAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
KUALITAS PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAERAH:	
Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	PP 6/2008
Rasio PAD terhadap total penerimaan APBD	
Rasio PAD terhadap total pengeluaran APBD	
Rasio wajib pajak daerah dan jumlah penduduk	
KUALITAS PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAERAH:	
Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	PP 6/2008
Persentase potensi penerimaan daerah yang dapat digali	
KUALITAS PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAERAH:	
Jumlah temuan pemeriksaan pada pelaksanaan APBD	
Tingkat capaian kinerja rata-rata SKPD	
KUANTITAS PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAERAH:	
Nilai sumber pembiayaan alternatif yang dapat disediakan	
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
KUANTITAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA:	
Jumlah menara pemancar radio yang dibangun	
Jumlah sertifikat operator radio yang diterbitkan	
Jumlah pengadaan sarana komunikasi radio	
KUALITAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA:	
Luas jangkauan pemancar radio (broadcast)	
Jumlah masyarakat yang memiliki pesawat radio dan televisi	
Jumlah pemegang ijin usaha penyiaran	
Jumlah wartel dan internet yang memiliki ijin	
Jumlah pelanggan saluran telepon rumah	
Jumlah pelanggan saluran telepon seluler	
Persentase pengaduan masyarakat tentang pelanggaran komunikasi dan informasi	
PDRB dari sektor jasa komunikasi	
PENINGKATAN DUKUNGAN TATA RUANG	
KUALITAS KE-TATA RUANG-AN:	
Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	PP 6/2008
Rasio bangunan ber-IMB per satuan	PP 6/2008
Kesesuaian terhadap RTRW	PP 6/2008
Luas wilayah produktif	PP 6/2008
Luas wilayah industri	PP 6/2008
Luas wilayah kebanjiran	PP 6/2008
Luas wilayah kekeringan	PP 6/2008
Luas wilayah perkotaan	PP 6/2008
Jumlah bangunan yang sudah dibangun di kawasan yang diperuntukkan	
Jumlah luas kawasan yang sudah dibangun sesuai dengan peruntukannya	
Persentase bangunan rumah tinggal yang telah mempunyai surat Ijin Mendirikan Bangunan	
Jumlah peserta sosialisasi tata ruang	
Jumlah masukan dalam rangka penyempurnaan tata ruang	
Persentase penggunaan tata ruang sesuai dengan perencanaan/peruntukan	
Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	PP 6/2008
Rasio bangunan ber-IMB per satuan	PP 6/2008
Kesesuaian terhadap RTRW	PP 6/2008
Jumlah pelanggaran terhadap penggunaan tata ruang	
Peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi rencana tata ruang Kab Bandung	

NO	INDIKATOR KINERJA	REFF
1	2	3
21	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	
	KUALITAS PEREMPUAN DAN ANAK:	
	Angka Gender-related Development Index (GDI)	
	Angka Gender Empowerment Measure (GEM)	
	Angka Gender-related Develeopment Index (GDI) / Indeks Pembangunan Jender (IPJ)	Dep
	Angka Gender Empowerment Measure (GEM) / Indeks Pemberdayaan Jender (IDJ)	Dep
	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	PP 6/2008
	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	PP 6/2008
	Rasio siswa perempuan dibanding laki-laki	MDG
	Rasio angka melek huruf pada perempuan dibanding laki-laki usia 15 - 24 tahun	MDG
	Rasio KDRT	PP 6/2008
	Persentase tenaga kerja dibawah umur	PP 6/2008
	Angka kcelakaan kerja pada tenaga kerja wanita	
	Jumlah program yang secara khusus menangani wanita dan anak	
22	**PENCIPTAAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH**	
	KUALITAS TATA PEMERINTAHAN DAERAH:	
	Indeks Kepuasan masyarakat	
	Indeks Persepsi Korupsi	
	Jumlah SKPD yang menyusun Laporan Kinerja	
	Jumlah kasus KKN	
	Jumlah temuan pemeriksaan eksternal	
	KUANTITAS PELAYANAN PUBLIK:	
	Jumlah unit pelayanan satu atap (OSS)	
	KUALITAS PELAYANAN PUBLIK:	
	Persentase pengaduan masyarakat tentang layanan publik yang telah ditindaklanjuti	
	KUALITAS SDM APARATUR DAERAH:	
	Jumlah temuan pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti	
	Persentase PNS yang mendapatkan hukuman disiplin	
	Rata-rata tingkat kehadiran PNS dalam 1 tahun	
	Persentase PNS yang mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas yang menjadi tanggungjawabnya	
	KUALITAS APARATUR DAERAH:	
	Jumlah SKPD yang telah menyusun Laporan Kinerja	
	Jumlah SKPD yang telah memiliki Indikator Kinerja Utama	
	Persentase satker yang kelembagaannya telah sesuai dengan kebutuhan dan peraturan	
	Jumlah SKPD yang telah dievaluasi SOTK	
23	**PENGUATAN OTONOMI DESA**	
	KUALITAS OTONOMI DESA:	
	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	PP 6/2008
	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	PP 6/2008
	Jumlah LSM	PP 6/2008
	Jumlah desa yang telah memiliki standar pelayanan	
	Jumlah pertemuan aparatur desa dengan masyarakat	
	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	PP 6/2008
	Jumlah desa yang telah memiliki standar pelayanan	
	KUANTITAS SDM:	
	Jumlah aparatur Desa yang mengikuti Diklat	
	KUALITAS SDM:	
	Angka rata-rata aparatur pemerintahan desa dengan pendidikan S1 per desa	
	Persentase peningkatan pendapatan aparatur Desa	
	KUANTITAS SARANA DAN PRASARANA:	
	Rasio kecukupan sarana dan prasarana Desa	
	Rasio pendapatan asli Desa terhadap APB Desa	

NO	INDIKATOR KINERJA	REFF
1	2	3
	KUALITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA:	
	Jumlah masukan tentang pembangunan dari masyarakat	
	Jumlah masukan tentang pembangunan dari masyarakat yang diakomodasi	
24	**PENGEMBANGAN KESATUAN BANGSA**	
	KUALITAS KESATUAN BANGSA, POLITIK, DAN DEMOKRASI:	
	Jumlah masalah/kejadian terkait ketahanan bangsa	
	Jumlah masukan masyarakat yang diakomodasi dalam PERDA	
	Jumlah pemilihan kepala desa yang dilakukan secara demokratis	
	Jumlah pengaduan mengenai kecurangan dalam pemilihan	
	KUANTITAS DEMOKRASI:	
	Jumlah Raperda yang diusulkan	
	Jumlah PERDA yang diputuskan DPRD	
	Waktu rata-rata pembahasan Raperda menjadi PERDA	
	KUANTITAS POLITIK:	
	Jumlah rata-rata dengar pendapat dengan masyarakat dalam penyusunan PERDA	
	KUANTITAS PEMILIHAN:	
	Rasio ketersediaan sarana dan prasarana PILKADA	
	Jumlah sosialisasi tentang PILKADA yang dilakukan	
	KUALITAS KETAHANAN BANGSA:	
	Jumlah masalah/kejadian terkait ketahanan bangsa	
	Persentase perkawinan antar suku dibandingkan dengan total perkawinan	
	KUANTITAS KETAHANAN BANGSA:	
	Jumlah kampanye dan sosialisasi Ketahanan bangsa	
25	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**	
	KUANTITAS KELAUTAN PERIKANAN:	
	Jumlah ijin usaha perikanan yang diterbitkan	
	Jumlah dermaga perikanan laut yang direhabilitasi	
	Jumlah pengadaan kapal pengawas	
	KUALITAS KELAUTAN PERIKANAN:	
	Jumlah kelompok usaha yang bergerak di bidang perikanan	
	Jumlah produksi ikan untuk dikonsumsi per tahun	
	Luas areal usaha perikanan	
	Jumlah pengaduan masyarakat tentang adanya kerusakan terumbu karang	
	Persentase pengaduan masyarakat tentang adanya kerusakan terumbu karang yang ditindaklanjuti	
	Rata-rata lama proses ijin usaha perikanan	
	Persentase masyarakat yang biasa mengkonsumsi ikan sebagai makanan sehari-hari	
	Jumlah PDRB dari sektor perikanan dan kelautan	
	Rata-rata pendapatan perkapita masyarakat nelayan	
	Jumlah nilai ekspor hasil perikanan	
26	**PENANAMAN MODAL**	
	KUANTITAS PENANAMAN MODAL:	
	Jumlah iklan promosi investasi	
	Jumlah eksemplar buku direktori mitra usaha potensial	
	Jumlah peserta pelatihan yang lulus pelatihan	
	KUALITAS PENANAMAN MODAL:	
	Jumlah kerjasama penanaman modal	
	Jumlah kemitraan antara pengusaha besar dan menengah dengan pengusaha kecil	
	Jumlah pengunjung pameran investasi	
	Persentase permohonan penanaman modal yang dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan	
	Rata-rata lama proses perijinan mengenai penanaman modal	
	Persentase investor yang sudah atau akan menanamkan modal di daerah	

INDIKATOR KINERJA	REFF
2	3
Persentase investor yang mengatakan iklim usaha di daerah sudah cukup memadai untuk menjalankan bisnis	
Jumlah nilai investasi di daerah	
Persentase angkatan kerja yang terserap di lapangan kerja yang tersedia	
PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	
KUALITAS TRAMTIB DAN LINMAS:	
Angka kriminalitas	PP 6/2008
Angka kriminalitas yang tertangani	PP 6/2008
Jumlah demo	PP 6/2008
Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	PP 6/2008
Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	PP 6/2008
Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	PP 6/2008
Rata-rata kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban per tahun per 1.000 populasi	
KUALITAS PELAYANAN:	
Persentase laporan mengenai gangguan ketenteraman dan ketertiban yang direspon dalam waktu kurang dari 1 jam setelah laporan atau informasi diterima	
Persentase masyarakat yang merasa puas dengan tingkat ketenteraman dan ketertiban di daerah di daerah	
KUALITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN:	
Persentase kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban yang tertangani	
KUALITAS KEAMANAN LAINNYA:	
Jumlah kasus pelanggaran penyakit masyarakat	
Persentase kasus pelanggaran penyakit masyarakat yang tertangani	
Jumlah kasus pelanggaran sumber daya alam	
Persentase kasus pelanggaran sumber daya alam yang tertangani	
PENGEMBANGAN BUDAYA DAERAH	
KUALITAS BUDAYA:	
Jumlah grup kesenian aktif	PP 6/2008
Jumlah gedung kesenian	PP 6/2008
Jumlah perpustakaan	PP 6/2008
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	PP 6/2008
Jumlah atraksi budaya yang memadukan keragaman	
Jumlah kejadian masalah tentang perbedaan budaya	
Persentase perkawinan antar etnis/suku dibandingkan dengan total perkawinan dalam 1 tahun tertentu	
KUALITAS NILAI BUDAYA:	
Jumlah kebijakan daerah tentang penerapan nilai baru ke dalam budaya	
KUALITAS KEKAYAAN BUDAYA:	
Jumlah situs budaya	
Jumlah kegiatan/pertunjukan kebudayaan	
Jumlah judul buku sastra produk daerah yang terbit	
Jumlah kelompok budaya yang diberikan pembinaan	
KUALITAS KEKAYAAN BUDAYA:	
Jumlah atraksi budaya yang memadukan keragaman	
Persentase peminjaman buku mengenai sastra dan budaya yang dipinjam/dibaca dibandingkan dengan total koleksi perpustakaan yang dipinjam/dibaca	
Rata-rata frekuensi masyarakat yang menyaksikan pertunjukan budaya	
Rata-rata jumlah pengunjung museum per bulan	
PERENCANAAN PEMBANGUNAN	
KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN:	
Persentase Satker yang memiliki dokumen perencanaan yang up-to-date	
Persentase program dan kegiatan yang telah dievaluasi keberhasilannya	
Persentase perencanaan program/kegiatan yang disertai dengan feasibility study	

	INDIKATOR KINERJA	REFF
	2	3
	Persentase Satker yang mengajukan usulan program dan kegiatan yang tidak jelas tujuan dan sasarannya	
	Persentase Satker yang mengajukan usulan program dan kegiatan yang tidak jelas indikator kinerjanya	
	Persentase Satker yang mengajukan usulan program dan kegiatan yang tidak jelas dasar perhitungannya	
	Persentase pelaksanaan kegiatan/program yang sesuai dengan perencanaan	
	Persentase Satker yang berhasil mencapai tujuan dan sasarannya	
	STATISTIK	
	KUALITAS STATISTIK:	
	Jumlah permintaan informasi statistik oleh pihak ketiga	
	Jumlah pengunjung ekstern yang mengakses data statistik melalui website	
	Persentase informasi statistik yang telah dapat diakses melalui internet	
	Persentase ketersediaan data statistik yang mutakhir	
	Persentase pemenuhan permintaan survey sesuai dengan waktu yang diminta oleh pihak ketiga	
	Persentase kelengkapan pemenuhan permintaan data statistik	
	KEARSIPAN	
	KUANTITAS KEARSIPAN:	
	Jumlah sarana arsip yang diadakan	
	Jumlah luas pembangunan gedung untuk arsip	
	Jumlah peserta diklat penyetaraan jabatan fungsional arsiparis yang lulus pelatihan	
	KUALITAS KEARSIPAN:	
	Jumlah unit kerja yang telah menyelenggarakan Sistem Kearsipan	
	Persentase dokumen negara yang diarsipkan pada sarana yang memenuhi syarat	
	Persentase arsip elektronik yang telah dapat diakses jarak jauh oleh masyarakat	
	Rata-rata jumlah jam yang dibutuhkan untuk mendapatkan dokumen atau informasi	
	Rata-rata biaya pengelolaan arsip per tahun	
	Persentase dokumen negara yang berada dalam kondisi baik	
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	
	KUANTITAS PMD:	
	Jumlah kecamatan yang mendapatkan sosialisasi peraturan pemerintah tentang desa, kelluharan, dan LSM	
	KUALITAS PMD:	
	Persentase desa yang masyarakatnya telah mendapatkan bantuan usaha	
	Persentase masyarakat penerima bantuan usaha yang melakukan usaha sesuai dengan tujuan yang dinyatakan pada waktu pengajuan permohonan bantuan	
	Rata-rata permohonan bantuan usaha kepada masyarakat dapat diselesaikan	
	Persentase desa yang melaksanakan pembangunan dengan melibatkan masyarakat secara partisipatif	
	Persentase desa/kelurahan miskin	
	Persentase desa/kelurahan miskin tahun lalu yang keluar dari kriteria miskin tahun berikutnya	
	Rata-rata pendapatan perkapita penduduk desa/kelurahan	
	Persentase masyarakat yang dapat mengembalikan pinjaman	